

Judul : Anggota Dewan Barut Audensi dengan Komisi IV
Tanggal : Senin, 17 Desember 2012
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 13

Anggota Dewan Barut Audensi dengan Komisi IV

Jakarta, Pelita

Anggotan DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) melakukan audensi dengan Komisi IV DPR RI terkait masalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), diruang Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (16/10).

Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Komisi IV Firman Subagio dan beberapa orang anggota Komisi IV, Wakil Ketua DPRD Barut H Harijan Nuur HA SIP, dan anggota DPRD Barito Utara lainnya, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ir Iwan Rusdani MP, Kabid Tata Ruang Dinas PU Barito Utara.

Ketua Komisi IV, Firman Subagio mengatakan sangat menyambut baik dengan audensi-audensi karena DPR RI dan DPRD mempunyai tugas dan fungsi yang sama yaitu terhadap pelaksanaan yang namanya legislasi, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemerintahan.

Selain itu juga menyangkut dengan masalah pengawasan dan fungsi anggaran. Oleh karena itu banyak hal yang perlu disinkronkan terutama yang me-

nyangkut rencana program pembangunan yang terkait dengan Komisi IV.

Seperti diketahui Komisi IV membidangi pertanian, kehutanan, kelautan dan bulog. Tentunya banyak persoalan-persoalan khususnya yang terkait dengan pembangunan dimana pembangunan itu pada dasarnya sebelum diputuskan di tingkat pusat maka diawali dengan proses Musrenbang.

Namun fakta dan kenyataan di lapangan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Musrenbang itu kecenderungannya karena tergeredasi oleh Musrenbangnas, sehingga kecenderungannya di beberapa daerah terjadi keluhan kesah dari Gubernur, Bupati/walikota, bahwa keputusan-keputusan yang diambil Pemerintah Pusat dan DPR tidak seja-

lan dengan keputusan Musrenbang wilayah.

"Oleh karena itu pertemuan yang kita laksanakan hari ini perlu kita jadikan budaya yang baik terutama ada dua hal yaitu pada awal pembahasan anggaran, kami harapkan DPRD bisa memberikan masukan kepada DPR RI tentang rencana kerja dan rencana pembangunan yang ada di daerah masing-masing sehingga kami nantinya bisa menyimpulkan apakah yang disusun oleh pemerintah pusat sudah sesuai dengan keinginan daripada pemerintah daerah," katanya.

Yang kedua, jelasnya, mungkin ketika sudah pada tahap akhir penetapan anggaran, itu perlu diadakan pertemuan kembali, sehingga kami bisa menyampaikan kepada teman-teman dari DPRD, ini yang di sepakati dalam rencana kerja Pemerintah Pusat yang terkait dengan program daerah masing-masing, sehingga kawan-kawan DPRD juga bisa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan menjadi keputusan di tingkat pusat. (uzi)